

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Ilmu Pemerintahan

(Musaneff, 1982 : 8). Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur Dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara Dinas itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya suatu negara untuk mencapai tujuannya.

(Musaneff, 1992 : 15) Sedangkan pemerintahan adalah segala daya upaya suatu negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada.

Penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijaksanaan dan program oleh seluruh badan pemerintahan. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antar sektor dan antar lembaga.

Menurut (Admosudirjo 1989:183) Manajemen Pemerintahan adalah manajemen yang merupakan lanjutan langsung daripada pemerintahan atau tindak pemerintahan (*govermental act*) yakni misalnya manajemen daripada *goverment staff work*, *management* kepolisian, manajemen daripada *legal drafting* (penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya)

Fungsi pemerintah secara umum adalah

1. Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan, pembangunan, dan.
2. Pembinaan Masyarakat.

Menurut Syafii (2001:20) Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni dikatakan seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis dan spesifik.

Sedangkan menurut Ndraha (2003:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah sebuah system multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil, sedangkan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan civil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.

Dari penjelasan diatas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pembangunan
2. Fungsi Pemberdayaan dan
3. Fungsi Pelayanan

Namun didalam menjalankan ketiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintahan.

2. Azas-Azas dan Teknik Pemerintahan

Menurut Inu kencana, Azas ilmu pemerintahan adalah pedoman atau sesuatu yang di anggap kebenaran, yang menjadi tujuan berfikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Jadi dengan demikian yang menjadi asas ilmu pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti ideology suatu bangsa, dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahannya.

Untuk itu dalam membahas Azas suatu ilmu pemerintahan, kita perlu melihat berbagai prinsip-prinsip, pokok-pokok fikiran, tujuan, struktur organisasi, factor-faktor kekuatan dan proses pembentukan suatu Negara. Hal ini karena sebagai mana sifat daripada ilmu pemerintahan itu sendiri, maka dalam menentukan Azas ilmu pemerintahan, ini yang di selidiki hanyalah Azas pemerintahan dari suatu Negara tertentu, bukan pemerintahan pada umumnya.

Pada berbagai pemerintahan Negara memang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda sama sekali dengan Negara lainnya, yang berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Tentang Azas-Azas pemerintahan yang berlaku di Indonesia, Taliziduhu ndraha mengatakan sebagai berikut:

Pengertian Azas dalam hubungan ini adalah dalam arti khusus. Secara umum dapat dikatakan bahwa asas-asas pemerintahan tercantum di dalam pedoman-pedoman peraturan-peraturan, dan jika di usut sampai ketinggian

tertinggi, tibalah pada pancasila. Ada beberapa asas pemerintahan yang perlu diketahui antara lain sebagai berikut:

a. Azas aktif

Pemerintah memiliki sumber utama pembangunan, seperti antara lain keahlian, dana, kewenangan, organisasi dan lain-lain. Di Negara berkembang pemerintah senantiasa berada pada posisi sentral oleh karena itu pemerintah memegang peranan inovatif dan inventif. Bahkan pemerintah mengurus seluruh permasalahan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, mulai dari orang-orang yang belum lahir ke dunia (dengan keluarga berencana), Sampai pada orang yang sudah meninggal dunia (dengan dinas pemakaman). Jadi pemerintah itu selalu aktif dimanapun berada.

b. Azas Vrij bestuur

“Vrij” berarti kosong, sedangkan “bestuur” berarti pemerintahan. jadi Vrij bestuur adalah kekosongan pemerintahan. Hal ini timbul karena melihat bahwa tidak seluruhnya penjabaran setiap departemen dan non departemen sampai ke tingkat kecamatan-kecamatan, Apalagi kekelurahan-kekelurahan dan desa-desa. Sebagai contoh, pada suatu tempat dapat saja terjadi ketidakhadiran jajaran departemen parpostel sehingga surat menyurat yang menumpuk di kecamatan tersebut, baik surat-surat dinas maupun surat pribadi, terbengkalai karena aparat pelaksanaanya kosong. Oleh karenanya pekerjaan tersebut di bebaskan kepada aparat kecamatan. inilah yang dimaksud dengan Vrij bestuur. Azas ini biasanya di sebut juga sebagai asas mengisi kekosongan.

c. Azas Freies ermessen

Berlainan dengan asas vrij bestuur tersebut di muka, hal mana pekerjaan itu ada tetapi aparat pelaksanaanya tidak ada, Maka ada Azas freies ermessen, pekerjaan itu memang belum ada dan mesti dicari serta di temukan sendiri. Jadi terlepas dari hanya sekedar mengurus hal-hal yang secara tegas telah di gariskan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat yang lebih di atas, untuk dipertanggung jawabkan hasilnya. Dalam hal ini pemerintah bebas mengurus dan menemukan inisiatif pekerjaan baru, sepanjang tidak ada pertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan norma kebiasaan suatu tempat.

d. Azas Historis

Azas historis adalah asas yang dalam penyelenggaraan pemerintahan, bila terjadi suatu peristiwa pemerintahan, Maka untuk menaggulangnya pemerintah berpedoman kepada penanggulangan dan pemecahan peristiwa yang lalu, yang sudah pernah terjadi.

e. Azas Etis

Azas etis adalah asas yang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak lepas memperhatikan kaedah moral. Oleh karenanya di Negara Indonesia, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4) senantiasa di galakkan, disamping masing-masing agama berlomba untuk menyampaikan, bahwa pemerintahan bukan masalah sekuler yang terpisah jauh dari etika dan moral, tetapi merupakan amanah allah yang harus dipertanggung jawabkan di akhirat nanti.

f. Azas Otomatis

Azas otomatis adalah asas dengan sendirinya, yaitu bila ada suatu kegiatan baru yang di luar tanggung jawab suatu departemen atau non departemen, baik sifatnya rutin maupun sewaktu-waktu, maka dengan sendirinya pekerjaan itu di pimpin oleh aparat departemen dalam negeri sebagai poros pemerintahan dalam negeri, walaupun dengan tetap melibatkan aparat lain. Misalnya kepanitiaan hari besar nasional, penyambutan tamu Negara dan lain-lain. Di daerah di kelola oleh pemerintah daerah.

g. Azas Detournement de pauvoir

Azas detournement de pauvoir adalah asas kesewenang wenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya atau sebaliknya ketidak pedulian pemerintah terhadap masyarakatnya. Jadi asas ini merupakan pertentangan dari semua asas yang telah disampaikan di atas.

Menurut Inu kencana yang dimaksud dengan teknik-teknik pemerintahan adalah berbagai pengetahuan, kepandaian dan keahlian tertentu dalam cara yang dapat di tempuh atau digunakan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan berbagai pristiwa-pristiwa pemerintahan.

Untuk teknik pemerintahan di Indonesia ini, perlu diketahui beberapa teknik sebagai berikut:

a. Koordinasi

Menurut Prof.Terry koordinasi adalah sinkronisasi teratur upaya untuk memberikan waktu dan pengarahan yang tepat untuk eksekusi yang

mengakibatkan harmoni dan tindakan terpadu terhadap objektivitas yang dinyatakan.

Menurut prof, Mooney koordinasi adalah pengaturan teratur upaya kelompok untuk memberikan kesatuan tindakan dalam persuit dari tujuan bersama.

Melihat pengertian-pengertian di atas, Maka unsur-unsur yang diperlukan dalam koordinasi adalah sebagai berikut:

- (1) Pengaturan;
- (2) Sinkronisasi;
- (3) Kepentingan bersama;
- (4) Tujuan bersama;

b. Partisipasi

Menurut Davis partisipasi adalah sebagai berikut:

Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab untuk mereka.

c. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada pemerintah daerah, untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

d. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang, dari pemerintah pusat atau kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah.

e. Sentralisasi

Sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan pada pemerintah pusat, Dalam hubungan pusat dan daerah, pada suatu sistem pemerintahan.

f. Integrasi

Integrasi adalah usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap rakyat sedemikian rupa sehingga mereka dapat memberi keputusan kepada organisasi atau pemerintah pusat. Misalnya usaha pemerintah NKRI terhadap Irianjaya dan Timor Timur (masing-masing dijadikan provinsi daerah tingkat (I), sehingga dengan hubungan antar pusat dan daerah dan tindakan disipliner yang baik kegiatan- kegiatan menjadi saling mengisi dan terarah dalam mencapai tugas pokok, Demi perbaikan kepentingan Negara dan bangsa.

g. Delegasi

Delegasi adalah suatu proses dimana otoritas seorang atasan di teruskan ke bawah kepada seorang bawahan. Kemampuan untuk mendelegasikan wewenang adalah salah satu dari empat hal yang sangat penting dalam kepemimpinan pemerintahan. Keseluruhan empat hal yang penting itu adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan untuk melihat perusahaan secara keseluruhan
2. Kemampuan untuk mendelegasikan wewenang
3. Kemampuan untuk komando kesetiaan
4. Kemampuan untuk mengambil keputusan

3. Konsep Tugas dan Fungsi Pemerintahan

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam

suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi, dan misi suatu organisasi. Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Adapun definisi tugas menurut ahli yaitu :

Dale Yoder dalam Moekijat (2008:9) tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan.

Mangkunegara (2010:27) mengemukakan bahwa suatu tugas Merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Tjiptono (2009:10) mengemukakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.

Berdasarkan definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Menurut Ndraha (2005:25) menjelaskan bahwa fungsi bersifat objektif sedangkan tugas bersifat subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada tiga, pertama

adalah fungsi pembangunan, kedua adalah fungsi pemberdayaan, dan ketiga adalah fungsi pelayanan.

Sedarmayanti (2004:9) menyatakan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas dari pemerintah:

- a. Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia.
- b. Memajukan Kesejahteraan Umum.
- c. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.
- d. Melaksanakan Ketertiban Dunia Yang Berdasarkan Kemerdekaan Abadi Dan Keadilan Sosial

4. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011: 74) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Kebijakan Yang Ditetapkan Bersama BPD.
2. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa.
3. Menetapkan Peraturan Desa Yang Telah Mendapat Persetujuan Bersama BPD.
4. Menyusun Dan Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Mengenai APBDes Untuk Dibahas Dan Ditetapkan Bersama BPD.
5. Membina Kehidupan Masyarakat Desa.
6. Membina Perekonomian Desa.
7. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif.
8. Mewakili Desanya Di Dalam Dan Di Luar Pengadilan Dan Dapat Menunjuk Kuasa Hukum Untuk Mewakilinya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Melaksanakan Wewenang Lain Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Hanif Nurcholis (2011: 74) juga mengatakan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban:

1. Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan NKRI.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
3. Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat.
4. Melaksanakan Kehidupan Demokrasi.
5. Melaksanakan Prinsip Tata Pemerintahan Desa Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme.
6. Menjalin Hubungan kerja Dengan Seluruh Mitra Kerja Pemerintahan Desa.
7. Menaati Dan Menegakan Seluruh Peraturan Perundang-Undangan.
8. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Yang Baik.
9. Melaksanakan Dan Mempertanggung Jawabkan Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Melaksanakan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Desa.
11. Mendamaikan Perselisihan Masyarakat Di Desa.
12. Mengembangkan Pendapatan Masyarakat Dan Desa.
13. Membina, Mengayomi, Dan Melestarikan Nilai-Nilai Sosial Budaya Dan Adat Istiadat.
14. Memberdayakan Masyarakat Dan Kelembagaan Di Desa.
15. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam Dan Melestarikan Lingkungan Hidup.

Menurut Maschab dalam Maulidiah (2014: 347) Desa adalah sebagai satu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling kenal mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak tergantung pada alam. Selanjutnya oleh Soehartono (2014:348) Desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial, ekonomi. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama.

5. Konsep Kepemimpinan

Menurut Nawawi (2012:72) menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, meskipun tidak mengikuti rangkaian yang sistematis. Rangkaian itu berisi kegiatan menggerakkan, membimbing dan mengarahkan serta mengawasi orang lain dalam berbuat sesuatu, baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Seluruh kegiatan itu dapat disebut sebagai usaha mempengaruhi perasaan, pikiran, dan tingkah laku orang lain kearah pencapaian suatu tujuan. Oleh karena itu, kepemimpinan juga merupakan proses interaksi antar seseorang (pemimpin) dengan sekelompok orang lain, yang menyebabkan seseorang atau kelompok berbuat sesuatu yang sesuai dengan kehendak pemimpin.

Selanjutnya (Nawawi:74) mengatakan kepemimpinan yang efektif hanya akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan fungsinya. Fungsi kepemimpinan itu berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian di dalam situasi sosial kelompok/organisasinya. Secara operasional dapat dibedakan lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu:

1. Fungsi Instruktif

Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah, pemimpin sebagai pengambilan keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bila

mana (waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Fungsi orang yang dipimpin (anggota kelompok/organisasi) hanyalah melaksanakan perintah, inisiatif tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perintah itu, sepenuhnya merupakan fungsi pemimpin

2. Fungsi Konsultatif

Fungsi ini berlangsung dari bersifat komunikasi dua arah, meskipun pelaksanaannya sangat tergantung pada pihak pemimpin. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan, yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Konsultasi itu dapat dilakukannya secara terbatas hanya dengan orang-orang tertentu saja, yang dinilainya mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukannya dalam menetapkan keputusan. Dengan menjalankan fungsi konsultatif dapat diharapkan keputusan-keputusan kepemimpinan akan mendapat dukungan dan lebih mudah menginstruksikannya, sehingga kepemimpinan berlangsung secara efektif.

3. Fungsi Partisipasi

Fungsi ini tidak sekedar berlangsung dan bersifat dua arah, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif, antara pemimpin dengan sesama orang yang dipimpin. Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik itu dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompoknya memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam

melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi atau jabatan masing-masing. Fungsi partisipasi hanya mungkin terwujud jika pemimpin mengembangkan komunikasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran pendapat, gagasan, dan pandangan dalam memecahkan masalah-masalah. Bagi pemimpin akan dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan sehubungan dengan musyawarah menjadi penting, baik yang dilakukan melalui rapat-rapat maupun saling mengunjungi pada setiap kesempatan yang ada.

4. Fungsi Delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat/menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi ini mengharuskan pemimpin memilah-milah tugas pokok organisasinya dan mengevaluasi yang dapat dan tidak dapat dilimpahkan pada orang-orang yang dipercayainya. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan, pemimpin harus bersedia dan dapat mempercayai orang lain sesuai dengan posisi jabatannya, apabila diberi atau dapat pelimpahan wewenang, sedangkan penerima delegasi harus mampu memelihara kepercayaan itu, dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab.

Fungsi delegasi harus diwujudkan seorang pemimpin karena kemajuan dan perkembangan kelompok/organisasinya tidak mungkin diwujudkan sendiri. Pemimpin seorang diri tidak akan dapat berbuat banyak dan bahkan mungkin tidak ada artinya sama sekali, oleh karena itu, sebagian wewenangnya perlu didelegasikan pada para pembantunya, agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

5. Fungsi Pengendalian

Fungsi ini cenderung bersifat komunikasi satu arah, meskipun tidak mustahil untuk dilakukan dengan cara komunikasi dua arah. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Sehubungan dengan itu, berarti fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Dalam kegiatan tersebut pemimpin harus aktif, namun tidak mustahil untuk dilakukan dengan mengikutsertakan anggota kelompok/organisasinya. Bimbingan dan pengarahan yang dilakukan selama kegiatan kelompok/organisasi berlangsung pada dasarnya bersifat pengawasan preventif. Dengan melakukan kegiatan tersebut berarti pemimpin berusaha mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan setiap unit atau perseorangan dalam melaksanakan volume dan beban kerjanya atau perintah dari pemimpinnya. Kegiatan yang dilakukan dengan cara meluruskan setiap penyimpangan, agar secara terus-menerus terarah pada tujuan. Oleh karena itu sifatnya tidak boleh kaku, karena tidak mustahil dari anggota ditemukan sesuatu yang positif dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan.

Dalam Moenir (2015:94) Disiplin adalah suatu bentuk ketaatan terhadap aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ditetapkan. Maksud ditumbuhkannya disiplin kecuali kepatuhan terhadap aturan juga tumbuhnya ketertiban dan efisiensi. Ketaatan terhadap aturan tertulis sudah cukup jelas

karena semua aturan tertulis pada dasarnya adalah terbuka agar diketahui oleh semua orang yang berkepentingan.

Menurut Gordon dalam (Moenir:94) disiplin dalam pengertian yang utuh ialah suatu kondisi atau sikap yang ada pada semua anggota organisasi yang tunduk dan taat pada aturan organisasi. Salah satu syarat agar dapat ditumbuhkan disiplin dalam lingkungan kerja adalah adanya pembagian pekerjaan yang tuntas sampai kepada pegawai atau petugas yang paling bawah, sehingga setiap orang tahu dengan sadar apa tugasnya, bagaimana melakukannya, kapan pekerjaan dimulai dan kapan selesai, seperti apa hasil kerja yang disyaratkan, dan kepada siapa ia bertanggung jawabkan hasil pekerjaan itu.

Menurut Hasibuan (2007: 172) gaya kepemimpinan itu ada tiga yaitu:

1. Kepemimpinan Otoriter

Kepemimpinan ini adalah jika kekuasaan atau wewenang sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau kalau pimpinan itu menganut sistem sentralisasi wewenang. Falsafah pemimpin adalah “bawahan adalah untuk pimpinan”. Bawahan hanya bertugas sebagai pelaksana keputusan yang telah ditetapkan pimpinan, pemimpin menganggap dirinya orang yang paling berkuasa, paling pintar, dan paling cakap. Pengarahan bawahan dilakukan dengan memberikan instruksi atau perintah, ancaman hukuman, serta pengawasan dilakukan secara erat.

2. Kepemimpinan Partisipatif

Kepemimpinan ini adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerja sama yang serasi, menumbuhkan

loyalitas, dan partisipasi para bawahan. Pemimpinan memotivasi bawahan agar merasa ikut memiliki suatu perusahaan. Falsafah pemimpin ialah “pimpinan (dia) adalah untuk bawahan”. Bawahan harus berpartisipasi memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan tetap dilakukan pimpinan dengan mempertimbangkan saran atau ide yang diberikan bawahannya.

3. Kepemimpinan Delegatif

Kepemimpinan ini adalah apabila seorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahan dengan agak lengkap, dengan demikian bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya. Pemimpin tidak peduli cara bawahan mengambil keputusan dan mengerjakan pekerjaan sepenuhnya diserahkan kepada bawahan. Pada prinsipnya pemimpin bersikap, menyerahkan, dan mengatakan kepada bawahan inilah pekerjaan yang harus saudara kerjakan, saya tidak peduli, terserah saudara bagaimana mengerjakannya asal pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan baik.

4. Kepemimpinan Situasional

Kepemimpinan ini terletak pada perilaku yang diobservasi atau perilaku nyata yang terlihat, bukan pada kemampuan atau potensi kepemimpinan yang dibawa sejak lahir. Penekanan pendekatan situasional adalah pada perilaku pemimpin dan anggota/pengikut dalam kelompok dan situasi yang variatif.

Menurut Soekanto (2012: 250) menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang (pemimpin) untuk memengaruhi orang lain (pemimpin dan pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana

dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Ia juga mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan hasil organisasi sosial yang telah terbentuk atau sebagai hasil dinamika interaksi sosial.

Menurut Kartini Kartono (2014: 56) mengemukakan bahwa kepemimpinan itu adalah sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan sifatnya spesifik, khas, diperlukan bagi satu situasi khusus.
- b. Pada umumnya pemimpin itu memiliki beberapa sifat-sifat superior.

Dalam Kartini Kartono juga mengatakan bahwa kepemimpinan terdapat beberapa unsur-unsur yaitu:

- a. Kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok.
- b. Kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain.
- c. Untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.

Selanjutnya, Kartini Kartono (2014: 80) juga menjelaskan bahwa tipe kepemimpinan sebagai berikut:

A. Tipe Karismatis

Tipe pemimpin ini memiliki kekuatan energi, daya tarik dan perbawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pegawai-pegawai yang bisa dipercaya. Pemimpin dianggap mempunyai kemampuan yang diperoleh dari kekuatan yang Maha Kuasa.

B. Tipe Paternalistis

Tipe pemimpin ini mempunyai sifat-sifat antara lain:

1. Menganggap bawahannya belum dewasa.
2. Bersikap terlalu melindungi.

3. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan.
4. Selalu bersikap maha tahu dan maha benar.

C. Tipe Militeristis

Tipe pemimpin ini mempunyai sifat-sifat antara lain:

1. Lebih banyak menggunakan sistem perintah/komando terhadap bawahannya keras sangat otoriter kaku dan seringkali kurang bijaksana.
2. Menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan.
3. Sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual dan tanda-tanda kebesaran yang berlebih-lebihan.
4. Menuntut adanya disiplin keras dan kaku dari bawahannya.
5. Tidak menghendaki saran, usul, sugesti, dan kritikan-kritikan dari bawahannya.
6. Komunikasi hanya berlangsung searah saja.

D. Tipe Otokratis

Kepemimpinan ini mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi. Setiap perintah dan kebijakan ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahannya, anak buah tidak pernah diberi informasi mendetail mengenai rencana dan tindakan yang harus dilakukan. Pemimpin otokratis berkuasa tunggal, absolut, dan merajai keadaan. Sikap dan prinsip-prinsipnya sangat konservatif /kuno dan ketat kaku.

E. Tipe Populistis

Kepemimpinan sebagai kepemimpinan yang dapat membangunkan solidaritas rakyat, kepemimpinan ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat

yang tradisional, juga kurang mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan hutang-hutang luar negeri.

F. Tipe Administratif atau Eksekutif

Kepemimpinan ini adalah kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas administrasi secara efektif. Para pemimpinnya terdiri dari tenokrat dan administrator yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Dengan demikian dapat dibangun sistem administrasi dan birokrasi yang efisien untuk memerintah yaitu untuk memantapkan integritas bangsa pada khususnya, dan usaha pembangunan pada umumnya

G. Tipe Demokratis

Kepemimpinan ini berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada bawahan dengan penekanan pada rasa tanggung jawab internal (pada diri sendiri) dan kerja sama yang baik.

Menurut George R. Terry (dalam Soekanto: 2012) mengatakan kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok. Howard H. Hoyt dalam bukunya *Aspect of Modern Public Administration*, menyatakan bahwa kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia, kemampuan untuk membimbing orang.

Menurut G. U. Cleeton dan C. W. Mason (1934) (dalam Syafiie: 106) mengatakan bahwa kepemimpinan menunjukkan kemampuan memengaruhi orang-

orang dan mencapai hasil melalui Himbauan emosional dan ini lebih baik dibandingkan dengan melalui penggunaan kekuasaan. Ralph M. Stogdill (1974) menghimpun sebelas kelompok dari keseluruhan definisi kepemimpinan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan sebagai pusat proses kelompok.
2. Kepemimpinan sebagai kepribadian yang berakibat.
3. Kepemimpinan sebagai seni menciptakan kesepakatan.
4. Kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi.
5. Kepemimpinan sebagai tindakan perilaku.
6. Kepemimpinan sebagai suatu bentuk bujukan.
7. Kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuasaan.
8. Kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan.
9. Kepemimpinan sebagai hasil interaksi.
10. Kepemimpinan sebagai pemisahan peranan.
11. Kepemimpinan sebagai awal struktur.

Selain itu, menurut Ordway Tead (dalam Syafiie: 133) mengatakan bahwa kepemimpinan sebagai perpaduan perangai yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya. Ordway juga mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain untuk mengambil langkah-langkah atau tindakan menuju suatu sasaran bersama. Karena itu kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar mau bekerja untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Kepemimpinan merupakan konsep relasi yang artinya kepemimpinan hanya ada dalam relasi dengan orang lain, jika tidak ada pengikut, maka tidak ada pemimpin. Dalam pengertian ini, kepemimpinan yang efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan berelasi

dengan pengikutnya. Kepemimpinan ada jika memenuhi sejumlah persyaratan sebagai berikut:

1. Mempunyai kekuasaan, yaitu kekuatan, otoritas, dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pimpinan guna mempengaruhi orang lain untuk berbuat sesuatu.
2. Memiliki kewibawaan, yaitu kelebihan, keunggulan, dan keutamaan sehingga mampu mempengaruhi atau mengatur orang lain agar orang lain itu patuh dan bersedia melakukan tindakan tertentu.
3. Mempunyai kemampuan, yaitu segala daya kesanggupan, kekuatan, dan kecakapan/keterampilan/pengetahuan/ yang dianggap melebihi orang lain

Menurut Pamudji (dalam Pasolong: 2008) mengatakan bahwa:

1. Kepemimpinan nuansanya mengarah kepada kemampuan individu, yaitu kemampuan seorang pemimpin.
2. Kepemimpinan merupakan kualitas hubungan atau interaksi antara pemimpin dan pengikut dalam situasi tertentu.
3. Kepemimpinan berdasar pada sumber-sumber yang ada dalam dirinya untuk mencapai tujuan.
4. Kepemimpinan diarahkan untuk mewujudkan keinginan pemimpin walaupun akhirnya mengarah ketercapaian tujuan organisasi.

6. Konsep Peranan

Dalam Soerjono (2012: 212) Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan Ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang,

Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Peranan Mencakup 3 Hal, yaitu sebagai Berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai pelaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perkembangan pembangunan diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap kehidupan masyarakat artinya keberhasilan pembangunan sebagai wujud dari keinginan serta kebutuhan dari masyarakat yang berada di desa dan wilayah tempat tinggalnya. Keberhasilan dan kegagalan kepala desa dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya sangat dipengaruhi dan didukung oleh kemampuan, pengalaman, serta pemahamannya terhadap masalah masyarakat yang dipimpinnya.

Faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses pembangunan adalah faktor partisipasi masyarakat dalam program pembangunan sangat diperlukan, sebab keinginan disatu pihak tentu saja tidak bisa terwujud jika tidak didukung oleh pihak lain karena bisa berakibat menjadi terkendalanya proses penyelenggaraan pembangunan.

Partisipasi dapat dipahami dalam dua hal yaitu :

1. partisipasi merupakan sebuah alat, dimana partisipasi dilihat sebagai sebuah teknik untuk membantu memajukan program desa atau disebut pembangunan partisipasi.
2. partisipasi sebagai sebuah tujuan itu sendiri yang dapat dinyatakan sebagai pemberdayaan rakyat yang dipandang dari segi perolehan keahlian, pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk membangun.

7. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini, LSM berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Dalam kaitan ini, usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan local, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program nasional. Di sini, masyarakat difasilitasi untuk memberi kebutuhan, masalah dan peluang pembangunan dan perikehidupan mereka sendiri. Selain itu mereka juga menemukan solusi yang tepat dan mengakses sumber daya yang diperlukan, baik sumber daya eksternal maupun sumber daya milik masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk

mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian menjadi basis program daerah, regional dan bahkan program nasional.

Menurut Nasikun (2000) dalam Subejo dan Supriyanto (2005), terkait dengan paradigma pembangunan yang baru tersebut juga harus berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, Masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya termasuk pemilikan serta penguasaan asset infrastrukturnya sehingga distribusi keuntungan dan manfaat keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh beberapa komponen atau aspek kunci, sebagaimana dicatat oleh subejo dan supriyanto (2005).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan pradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *“people-centered, participatory, empowering, and sustainable”* (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1996).

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan pranarka (1996), manusia adalah subjek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar

menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Pembangunan haruslah menepatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan harus menguntungkan semua pihak. Dalam konteks ini, masalah kemiskinan, Kelompok rentan dan meningkatnya pengangguran perlu mendapat perhatian utama karena bias menjadi penyebab instabilitas yang akan membawa pengaruh negatif, seperti longgarnya ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia. Karena itu, Komitmen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang adil dan tanpa mengecualikan rakyat miskin, meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari hak azasi, nondiskriminasi dan memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung merupakan hakekat dari paradigma pembangunan berpusatkan pada rakyat.

8. Konsep Pembangunan

Dalam Siagian (2014: 4) Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dari penjelesan Siagian tersebut dapat disimpulkan mengenai pembangunan yaitu:

1. Pembangunan merupakan suatu proses yang bermakna rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di

satu pihak bersifat independen. Akan tetapi di pihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir. Hal ini ditentukan berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek dalam perencanaan pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu Negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda. Dengan perkataan lain, suatu Negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan status quo yang ada.
5. Pembangunan mengarah kepada modernitas yang bermakna pada cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Setiap Negara bangsa yang modern harus tetap mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang dipandang luhur oleh Negara bangsa yang bersangkutan.

6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan bersifat multidimensional yang mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Usaha pembinaan bangsa ini untuk Negara yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi Negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan Negara bangsa lain tersebut.
8. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 menyebutkan bahwa Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa sebagaimana pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang mekanisme tata kelola penyelenggaraan pemerintah Desa termasuk di dalamnya pembangunan Desa. Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI. Bagi Indonesia, penyelenggaraan pemerintah Desa yang berkualitas berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat Desa, sekaligus meningkatkan kualitas hidup di Desa. Melalui implementasi Undang-Undang ini diharapkan

pembangunan di perdesaan tidak hanya akan lebih merata tetapi lebih partisipatif, sesuai dengan potensi ekonomi, dan lebih berkeadilan.

Dengan Undang-Undang Desa ini, Penyelenggaraan Pemerintah Desa diharapkan dapat mengelola wilayah secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan dan pendapatan Desa. Untuk memberi insentif bagi penyelenggaraan pemerintah Desa, Undang-Undang ini memberikan jaminan penghasilan dan sejumlah tunjangan bagi Kepala Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Beberapa tujuan pemerintahan Desa dalam Undang-Undang ini antara lain tertuang dalam pasal 4 yaitu : membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan Nasional, dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan asset Desa.

1. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Untuk menopang penyelenggaraan pemerintah Desa khususnya terkait anggaran dan belanja pemerintah Desa, maka salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi belanja pusat dapat memanfaatkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan

(pasal 72 ayat 2). Selain itu, dalam Undang-Undang ini juga dialokasikan minimal 10% masing-masing dari hasil pajak/retribusi daerah dan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (pasal 72 ayat 3 dan 4).

2. Pada pasal 76 dan pasal 77 Desa diberi kewenangan untuk mengelola asset yang berada di wilayahnya dan dicatat sebagai kekayaan Desa. Secara teknis, pengelolaan keuangan dan asset Desa akan di tuangkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah yang sedang dipersiapkan.

Perencanaan pembangunan desentralistik adalah pemerintah daerah mempunyai peranan yang cukup penting. Pemerintah daerah dibagikan alokasi dana dalam bentuk “Block Grand” yang penggunaannya ditetapkan sendiri oleh pemerintah daerah melalui badan perencanaannya masing-masing. Keuntungannya adalah masyarakat lokal diberikan kewenangan yang cukup untuk dapat menentukan arah pembangunan daerahnya sendiri sesuai potensi dan permasalahan pokok yang dihadapi oleh daerah bersangkutan.

Menurut Sjafrizal, Tahapan perencanaan pembangunan menggambarkan tugas pokok perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Tahap Penyusunan Rencana.

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana. Penyusunan rencana dapat dilakukan secara swakelola oleh badan perencana sendiri atau dikontrakan kepada perusahaan konsultan yang relevan bila tenaga perencana yang terdapat pada badan perencana tidak mencukupi.

2. Tahap Penetapan Rencana.

Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan berlaku.

3. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana.

Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu.

4. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana.

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

9. Konsep perencanaan partisipatif

Slamet (dalam Awang 2006 : 168), menegaskan bahwa usaha pembangunan pedesaan melalui proses perencanaan partisipatif perlu didekati dengan berbagai cara yaitu:

- (1) Penggalan potensi-potensi dapat dibangun oleh masyarakat setempat,
- (2) Pembinaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan, pengembangan, penyebaran sampai digunakannya teknologi itu oleh masyarakat pedesaan,

- (3) Pembinaan organisasi usaha atau unit pelaksana yang melaksanakan penerapan berbagai teknologi tepat guna untuk mencapai tujuan pembangunan,
- (4) Pembinaan organisasi yang menyambungkan usaha pembangunan yang dilakukan oleh individu-individu warga masyarakat pedesaan dengan lembaga lain atau dengan tingkat yang lebih tinggi (Kota,kecamatan, kabupaten, provinsi, dan Nasional)
- (5) Pembinaan kebijakan pendukung, yaitu yang mencakup input, biaya kredit, pasaran, dan lain-lain yang memberi iklim yang serasi untuk pembangunan.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan yaitu partisipasi istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pembangunan masyarakat dimana-mana, seolah-olah menjadi “lebel baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam perkembangannya sering kali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang diperaktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna, partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

10. Konsep Pembangunan Partisipatif

Menurut Luekman Soetrisno (1995: 229), Pembangunan partisipatif yaitu pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subjek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi mereka sendiri.

Untuk melaksanakan pembangunan yang partisipatif di Indonesia masih dibutuhkan paket deregulasi tersendiri. Paket deregulasi yang menyangkut pelaksanaan pembangunan yang bersifat partisipatif itu mengandung beberapa aspek.

- (1) Menimbulkan dan mendorong tumbuhnya sikap toleransi yang tinggi dikalangan aparat pelaksana pembangunan terhadap kritik yang dilontarkan oleh rakyat terhadap pembangunan.
- (2) Di kalangan para aparat pemerintah harus dikembangkan suatu sikap yang melihat bahwa pembangunan dan membangun masyarakat sudah seharusnya sesuai dengan tugas suatu pemerintah dan bukan merupakan suatu hal yang luar biasa.
- (3) Paket deregulasi ini harus ditunjukkan dalam memantapkan tekad pemerintah untuk melaksanakan konsep desentralisasi sebagai dasar pelaksanaan konsep pembangunan yang partisipatif.

11. Konsep Partisipasi

Parwoto (1997) Partisipasi merupakan pelimpahan secara penuh pada suatu tekad yang lebih menjadi kesepakatan bersama anggota dalam suatu kelompok atau antara sampai dengan skala nasional dengan merupakan bagian tidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia maka partisipasi dapat disebut sebagai “Filsafah Pembangunan Indonesia” apabila tiap pembangunan haruslah menerapkan konsep partisipasi.

Menurut Burke (2004:10) adalah keuntungan dan masalah partisipasi akan dilihat dalam konteks yang berbeda oleh setiap orang yang berkepentingan , secara umum keuntungan dari partisipasi:

- a. Masyarakat akan merasa “memiliki” terhadap rencana kerja.
- b. Memungkinkan adanya ide-ide segar.
- c. Menepatkan bantuan dalam bentuk barang atau sumber daya lainnya.
- d. Masyarakat akan tetap merasa bagian dari pemecahan masalah jangka panjang karena mereka telah mempunyai rasa memiliki terhadap ide-ide awal.
- e. Keikutsertaan dalam satu proyek atau program pembangunan sederhana, kepercayaan dan keyakinan menjadi bagian penting pada proyek atau kesempatan-kesempatan lainnya. Selain itu, keuntungan dari suatu keluaran atau *out put* yang lebih baik adalah issue “proses” membantu mengembangkan keterampilan *Confidence* dan metode yang banyak dipakai sebanyak mungkin sesuai dengan kesepakatan untuk mencapai hasil yang diinginkan masyarakat.

Menurut Wibisan (1989:24) partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program.

12. Konsep Teori Kepemimpinan Pemerintahan

Komarudin (1994:885) Mengatakan bahwa teori adalah seperangkat konsep, defenisi dan proposisi yang saling berkaitan dan menunjukkan gejala-gejala secara sistematis dengan menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan meramal gejala-gejala itu.

Beberapa teori kepemimpinan pemerintahan sebagai berikut dibawah ini:

- A. Teori Otokratis dalam kepemimpinan pemerintahan

Teori otokratis dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori sebagaimana seorang pimpinan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya bekerja tanpa menerima saran dari bawahan, perintah diberikan dalam satu arah saja artinya bawahan tidak diperkenankan membantah, mengkritik, bahkan bertanya.

Untuk itu perlu dalam teori otokratis ini pimpinan yang benar secara logika dan baik secara moral bahkan memiliki estetis kendati keras sekalipun. Dalam teori ini diperlukan pimpinan bersuara keras, berbadan besar, memiliki senjata, serta tangan yang selalu menunjuk ke suatu arah yang diperlukan agar tidak ada yang salah. Dalam keadaan darurat seperti penanggulangan bahaya, menghadapi musuh, terpepetnya waktu serta rawan dan kritisnya situasi teori ini diperlukan karena organisasi tidak memiliki waktu untuk berdialog.

B. Teori sifat dalam kepemimpinan pemerintahan

Teori sifat dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori yang mengatakan bahwa kepemimpinan tercipta dari seseorang berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki seseorang tersebut, berarti yang bersangkutan sudah sejak lahir memiliki ciri-ciri untuk menjadi pemimpin.

Menurut Teorim ini seseorang memiliki bawaan bakat turunan, antara lain cukup terampil untuk mengurus orang lain, memiliki kepekaan inisiatif mempunyai ransangan emosional untuk membela teman, dewasa dalam pemikiran, pandai membujuk dalam rayuan yang menghanyutkan, gampang berkomunikasi, percaya untuk tampil di depan umum, kreatif dalam menemukan gagasan baru,

mempunyai persepsi positif serta jalan keluar setiap masalah, dan selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan orang lain.

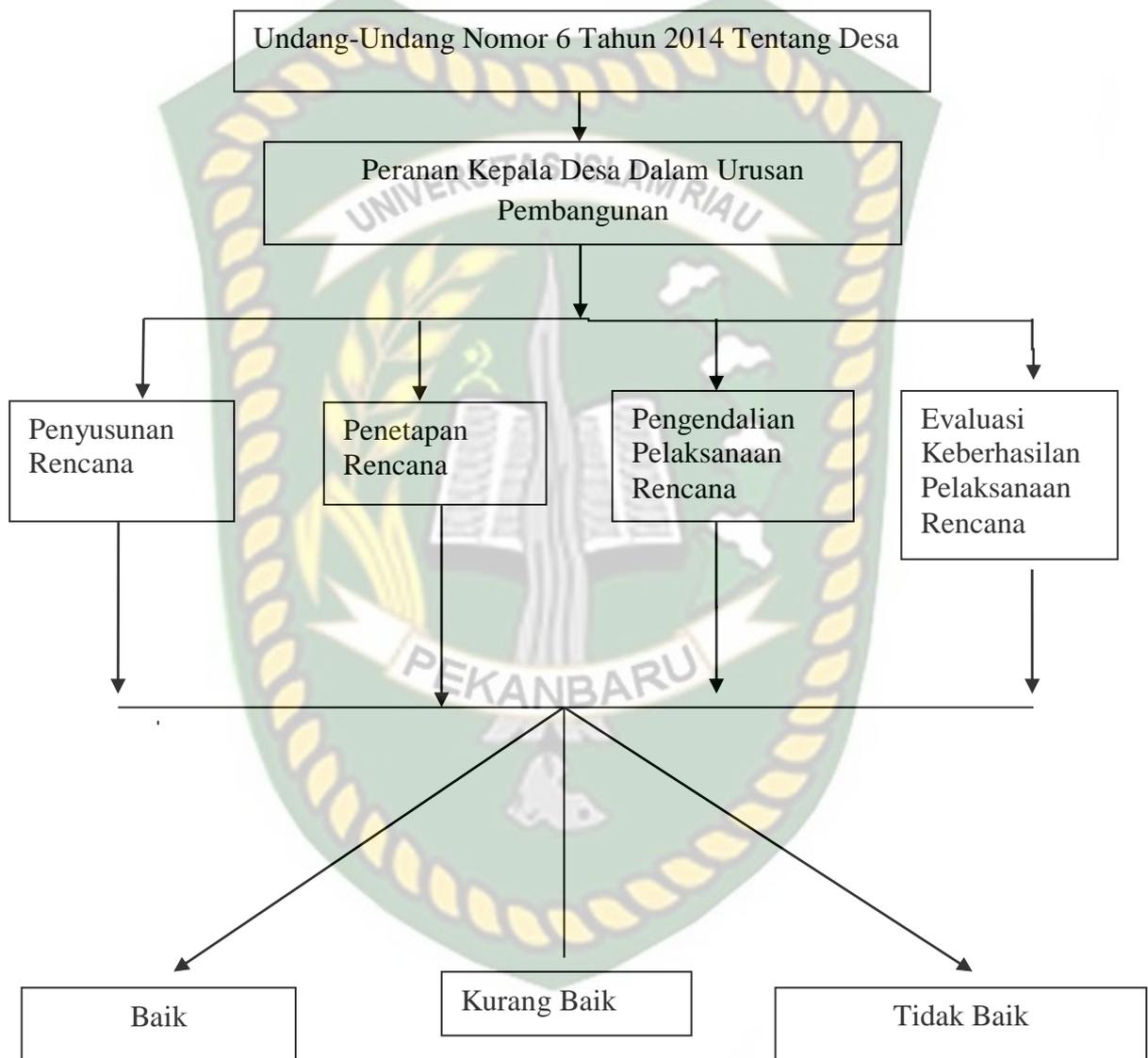


Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Kerangka Fikir

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Peranan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Urusan Pembangunan Desa Di Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Peranan



Hasil : Modifikasi Penulis 2018

C. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Peranan Kepala Desa Dalam melaksanakan urusan Pembangunan Desa di Desa Delik kecamatan pelalawan kabupaten pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD Desa delik.
2. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa delik.
3. Kepala Desa adalah Kepala desa delik.
4. Peranan adalah suatu upaya/kemampuan maupun perilaku dari kepala desa yang menduduki jabatan pemerintahan Desa Delik agar dapat menggerakkan dan membimbing serta menumbuhkan rasa kesadaran atau partisipasi masyarakat Desa Delik untuk mencapai tujuan yaitu tumbuh dan berkembang mencapai kesejahteraan bagi masyarakat Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan.
5. Peran Kepala Desa dalam pembangunan desa adalah usaha-usaha dan upaya-upaya yang dilakukan oleh perangkat organisasi Pemerintahan Desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa delik melalui pertumbuhan, perubahan dari segala aspek kehidupan masyarakat desa.
6. Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana menuju kondisi yang lebih baik dilakukan secara sadar oleh pemerintah desa delik dan masyarakat agar kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat tercapai di semua bidang.

7. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang digunakan salah satunya untuk mengantisipasi terjadinya perpecahan.
8. Pembangunan partisipatif yaitu pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subjek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan mereka sendiri.
9. Partisipasi adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
10. Penyusunan Rencana adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab pemerintah desa delik.
11. Penetapan Rencana Rancangan pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari BPD desa delik.
12. Pengendalian Pelaksanaan Rencana untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu.
13. Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

D. Operasionalisasi Variabel

		2. Tahap Penetapan Rencana	a. Kepala Desa melakukan rapat untuk mendapatkan pengarahan dari BPD b. Kepala Desa Mengundang semua anggota BPD c. Adanya tanggapan dan masukan dari anggota BPD	Ordinal Ordinal Ordinal
1	2	3	4	5

			d. Keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat atau voting	Ordinal
		3. Tahap Pengendalian pelaksanaan rencana	a. Kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana	Ordinal
			b. Kepala desa melakukan observasi kelapangan	Ordinal
			c. Kepala desa dapat menanggulangi permasalahan dan kendala yang dihadapi	Ordinal
		4. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana	a. Hasil pembangunan bermanfaat bagi masyarakat	Ordinal
			b. Apakah dana yang digunakan sesuai dengan RAB	Ordinal
			c. Apakah hasil pembangunan sesuai dengan rencana	Ordinal
			d. Apakah pembangunan bermanfaat bagi masyarakat	Ordinal

Sumber : Olahan Peneliti, 2018

E. Teknik Pengukuran Data

Di dalam mengetahui peranan Kepala Desa sebagai penyusunan rencana pembangunan, penetapan rencana pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan evaluasi rencana pembangunan dalam pembangunan Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, di tetapkanlah bentuk pengukuran baik itu pada pengukuran variabel maupun indikator variabel dengan data persentase.

Untuk pengukuran dalam bentuk variabel peranan Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, ditetapkanlah ukuran sebagai berikut:

- Baik : Apabila hasil penelitian seluruh indikator variabel berada pada ketegori baik atau jawaban responden berada pada kisaran 67-100%.
- Kurang Baik :Apabila tiga dari lima indikator variabel berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada kisaran34-66%.
- Tidak Baik : Apabila kurang dari tiga indikator variabel berada pada kategori baik berada pada kisaran 0-33%.

Untuk pengukuran indikator peranan Kepala Desa dalam pembangunan Desa Di Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana

Baik : Apabila hasil penelitian seluruh indikator variabel berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada kisaran 67-100%.

Kurang Baik : Apabila tiga dari lima indikator variabel berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada kisaran 34-66%.

Tidak Baik : Apabila kurang dari tiga indikator variabel berada pada kategori baik berada pada kisaran 0-33%.

2. Penetapan rencana

Baik : Apabila hasil penelitian seluruh indikator variabel berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada kisaran 67-100%.

Kurang Baik : Apabila tiga dari lima indikator variabel berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada kisaran 34-66%.

Tidak Baik : Apabila kurang dari tiga indikator variabel berada pada kategori baik berada pada kisaran 0-33%.

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Baik : Apabila hasil penelitian seluruh indikator variabel berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada kisaran 67-100%.

Kurang Baik : Apabila tiga dari lima indikator variabel berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada kisaran 34-66%.

Tidak Baik : Apabila kurang dari tiga indikator variabel berada pada kategori baik berada pada kisaran 0-33%.

4. Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Baik : Apabila hasil penelitian seluruh indikator variabel berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada kisaran 67-100%.

Kurang Baik : Apabila tiga dari lima indikator variabel berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada kisaran 34-66%.

Tidak Baik : Apabila kurang dari tiga indikator variabel berada pada kategori baik berada pada kisaran 0-33%.

